BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam gerakan Islam di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) sebagai *jam'iyah diniyah* atau organisasi sosial keagamaan yang bervisi Islam tradisional. Yaitu, keteguhannya dalam memegang hukum Islam ortodoks (madzhab sunni atau aliran-aliran hukum Islam). Dalam politik menggunakan politik Islam Sunni sebagai pendekatan metodologi *metodology approach*) dalam berbangsa dan bernegara yang selalu bersikap akomodatif. Hal ini terwuju pada era Demokrasi Terpimpin dan Parlementer-- dimana NU selalu mendapat jatah kekuasaan, baik dalam kabinet maupun di parlemen. Kedekatan NU seringkali dituduh sebagai kelompok yang sangat oportunis.

NU lahir dari sikap diskriminatif kelompok modernis. Kalangan modernis tidak menyertakan kalangan Islam Tradisional sebagai delegasi dalam Kongres Dunia Islam di Mekkah. Kalngan Tradisional membentuk delegasi seniri ke Mekkah yang bertujuan untuk meminta pada Raja Saud

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjamin kelestarian mazhab-mazhab ortodoks serta kegiatan tarekat di Hijaz (Arab saudi kini)[1].

Sikap pembaharu Islam ini mendapat reaksi dalam dinamika NU selanjutnya. Salah satu refleksi bentuk reaktif NU terhadap kalangan modernis adalah keluarnya NU dari Masyumi. Disusul dengan melepaskan keterikatan baju politik praktis melalui PPP pada Muktamar NU ke-27 di Situbondo 1984, untuk kembali ke khittah 1926. Sebagai konskuensinya adalah pemisahan secara tegas antara kegiatan-kegiatan politik dan kegiatan-kegiatan non-politik. NUmencurahkan segala potensi *jam,ivah* pada kegiatan-kegiatan non-politik (praktis), sosial keagamaan sebagaimana awal berdirinya.

Lalu pertanyaanya sekarang adalah apakah NU benar mampu memusatkan perhatian dan mengarahkan aktifitas-aktifitasnya semata-mata di bidang sosial keagamaan dan sama sekali memalingkan muka dari aktifitas politik? Kenyataan berbicara lain. Ketika era reformasi berlansung dengan dibukanya kran-kran demokrasi Partai Politik (Parpol),--mampu mempengaruhi sejumlah elit politisi NU turut menyemarakkkan greget berparpol. Alasan politik warga *nahdliyin* yang besar dan heterogen, tidak bisa ditepis untuk bergelut semata bidang sosial keagamaan.

---

[1]martin van Bruinessen, *NU Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKiS, 1994) h. 32-34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perjalanan NU pasca 1984 memang tampak rumit. warna-warni yang kian beraneka ragam murcul dalam aktifitasnya dapat menyilaukan mata para pengamat, jika mereka tidak berdiri dalam sudut pandang yang tepat serta dengan kaca mata yang tepat pula dalam menganalisis NU. Andree Feillard, menyadari betul hal itu. Penilainnya tentang NU dikutip agak panjang di sini:

> NU telah memilih untuk melaksanakan hijrah dengan caranya sendiri, dalam sustu bentuk yang lunak. Yaitu, meninggalkan pertarungan kekuatan dalam PPP, dan memusatkan diri dalam upaya membangun kembali (konsolidasi) kekuatannya yang telah sangat melemah setelah bertahun-tahun berarung dengan pemerintah, namun tetap memauki sistem yang ada sekarang. Ketimbang meminta PPP untuk bertarung untuk kepentingannya, NU mencoba mempertahankan kepentingannya lewat siap saja yang menawarkan diri: bisa jadi itu Golkar, tetapi sering pula melalui Presiden sendiri. NU tahu bahwa DPR yangmeniru model parlementer ala Barat, telah kehilangan pengaruhnya dalam lobi-lobi politik, sebagaimana kebanyakan kasus di negara-negara Dunia Ketiga: NU setengahnya menolak sistem ini, tetapi juga mengeksploitasinya dengan lebig cerdik lagi. Ambiguitas ini tampak dalam semua langgkah yang diambil NU: bahkan sejak situbondo (kembali ke khittah), dan akan selalu mewarnai pertanyaan yang berkisar seputar khittah.[2]

Dibagian lain, Feillard juga mengingatkan bahwa pada saat ini,

> NU mungkin bukan suatu gerakan politik.... tetapi ia tetap suatu kekuatan politik Denagn demikian, ia

---

[2]Andree Feillard, *Isyarat Politik Setelah Situbondo*, dalam Editor No 25, 7 Maret 1992. h. 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak bisa menjauh dari politik sama sekali.[3]

Asumsi Feillard di atas menandakan agenda NU pasca khittah untuk mencari model kepolitikan (pola gerakan) yang tapat dalam kapasitasnya sebagai organisasi sosial keagamaan di tengah kekuatan hegemoni pemerintah Orde Baru. Pada era sebelum 1984, ketika NU masih berupa Partai Politik maupn ketika bergabung dengan PPP, model kepolitikan NU cukup jelas dan tidak menjadi persoalan. Lepas dari efektifitas, kepentingan dan aspirasi politik warga NU dapat secara langsung tersalurkan melalui badan legislatif dimana NU jelas memerlukan formulasi baru. Dan ini bukan merupakan persoalan yang dapat dikatakan mudah seperti diakui oleh KH Abdurrahman Wahid, "merupakan statemen yang kompleks... (meskipun) kelihatannya sederhana".[4]

Dari kecendrungan di atas, penulis mencari inspirasi dari pengalaman pro demokrasi di Eropa Timur dan Eropa Tengah untuk *mereform* model kepolitikan (pola gerakan) NU yang berangkat dari episteme dasar bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan strategi paling tepat dalam konteks

---

[3] Ibid.

[4] KH. Abdurrahman Wahid, *Nahdlatul Ulama dan Khittah 1926* dalam Masyhur Amin dan Ismail Ahmad (ed), *Dialog Pemikiran Islam dan Realitas Empirik* (Yogyakarta: LKPSM, 1993) h. 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu sistem politik kekuatan negara yang cendrung intervensionis dan menguasai masyarakat. Sisi lain, ketika kekuatan hegemoni negara berkkurang, dimana mucul kebebasan warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politik melalui kelonggaran mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai wahana ekspresi ke bangsaan dari heterogintas warga NU yang berpotensi untuk berpolitik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika NU dalam implementasi keputusan untuk kembali ke khittah 1926?
2. Bagaimana arah pengembangan nilai-nilai khittah 1926?
3. Bagaimana pala gerakan politik NU berkaitan denagn implementasi keputusan untuk kembali ke khittah 1926?

C. Penegasan Judul

Nahdalatul Ulama(NU): Organisasi Islam yang berhaluan *Ahlussunnah wal Jamaah*. Di dirikan di Surabaya pada 31 Januari 1926. Organisasi yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan dan sempat menjadi organisasi politik. Sejak 1973

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NU kembali sebagai organisasi keagamaan non politik.[5]

Setelah Kembali : Setelah mempunyai makna lampau. Dan kembali sebagai kata kerja yang menyatakan pencaoutan, penarikan, pengulangan dan sebagainyua.[6]

Khittah 1926 : Kata khittah berarti garis pendirian, perjuangan dan kepribadian Nahdlatul Ulama, baik yang berhubungan dengan urusan keagamaan, maupun urusan kemasyarakatan, baik secara perorangan maupun secara organisasi. Setiap kali mengambil keputusan harus sesuai dengan khittah.[7]

Studi : Kajian, penelitian; penyelidikan ilmiah.[8]

Pemikiran : Proes, cara atau hasil berpikir.[9]

---

[5]BN. Marbun SH, *Kamus Polititk* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996)

[6]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: balai Pustaka, 1990).

[7]KH. Ahmad siddiq, *Penjelasan Khittah Nahdlatul Ulama* sebagaimana dalam Laode Ida, *Anatomi Konflik; NU, Elit Islam dan NEgara* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996) h. 59.

[8]Departemen Pendidikan, *op.cit.*,

[9]WJS Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahsa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pola Gerakan : Sistem, cara kerja; bentuk (struktur yang tepat) corak rencana. Dan gerakan berarti perouatan)usaha atau kegiatan) dalam lapangan sosial, policik agama dll.[10]

Politik : Mencakup kebijaksanaan atau tindakan yang bermaksud mengambil bagian dalam urusan kenegaraan atau pemerintahan termasuk yang menyangkut penetapan bentuk tugas dan urusan negara.[11]

D. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan kami memilih judul di atas adalah sebagai berikut:

1. NU sebagai organisasi sosial keagamaan dalam perkembangannya mempunyai nilai sejarah yang cukup multi-mental dengan tampilnya aneka gerakan kebangsaan.
2. NU setelah kembali ke khittah 1926 menjadi fenomena tersendiri dalam konstelasi politik Indonesia. Selain itu, NUmampu menempatkan diri sebagai satu-satunya organisasi sosial keagamaan secara mandiri

---

[10]Departemen Pendidikan. op.cit.,

[11]BN Marbum, op.cit.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan transformasi nilai-nilai organisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. NU dalam gerakan politik selalu mengacu pada nilai-nilai *ahlussunnah wal jamaah* dan sekaligus diaplikasikan dalam wacana kerakyatan sebagai basic pemberdayaan.

E. Tujuan Memilih Judul

Tujuan dari upaya penulisan skripsi yang kami lakukan adalah:

1. Ingin mendeskripsikan perjalanan NU dalam implementasi keputusan untuk kembali ke khittah 1926.
2. Ingin mencari arah kejelasan dalam perkembangan NU setelah kembali ke khittah 1926.
3. Ingin membentuk pola gerakan politik NU setelah kembali ke khittah 1926.

F. Metode Penulisan dan Sumber Data

Metode penulisan skripsi ini menggunakan metode deskripsi, induksi-deduksi, interpretasi. deskripsi yaitu, memaparkan secara teliti seluruh perkembangan NU dari awal keterlibatan berpolitik praktis sampai mengganti model kepolitikan. Induksi-Deduksi adalah setiap gerakan politik NU di pelajari, mencari makna politis gerakan-gerakan NU dan akhirnya dibentuk episteme (induksi) dilanjutkan denga hal-hal pokok (deduksi).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Interpretasi yaitu dalam pustaka di usahakan merefleksikan setepat mungkin dengan kritik-kritik wacana.

Sumber data dalam penulisan skripsi ini melalui literer atau kepustakaan. Kepustakaan yang digunakan melalui kepustakaan primer dan skunder. Kepustakaan primer yaitu, kepustakaan yan berkaitan langsung dengan pokok bahsan skripsi ini. sedangkan kepustakaan sekunder diambil dari kepustakaan umum yang berkaitan dengan pembahsan pokok dalam skripsi ini.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, pendahuluan. Bab ini merupakar pengantar penulisan skripsi yang berisi; latar belakang, rumusan masalah, penegasan judul, alsan memilih judul, tujuan memilih judul, metode penulisan dan sumber data serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, meliputi perkembangan NU--sejarah kelahiran, awal keterlibatan dalam politik, bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sampai memutuskan untuk kembali ke khittah.

Bab ketiga, berisi arah gerakan NU setelah kembali ke khittah 1926. Meliputi dinamika implementasi khittah menuju reorientasi gerakan politik NU.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat, mencari model gerakan politik NU. Setelah mengalami kegagalan dalam melaksanakan program-program kerakyatan sebagaimana awal berdirinya, juga strategi yang tepat diambil melalui perubahan paradigma wacan politik NU dengan pemberdayaan masyarakat sipil.

Bab kelima, meliputi kesimpulan dan penutup. Yaitu berisi kesimpulan, saran dan penutup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id